

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESRA
SETDA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015**

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Gorontalo pada khususnya, yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

Terbentuknya Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo sebagai salah satu perangkat daerah adalah untuk membantu Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan yang di dalamnya memuat tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta urusan Kesra di Daerah Provinsi Gorontalo.

B. Aspek Strategi Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2015 Tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas “Membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat, mempercepat pengembangan kualitas SDM perempuan yang handal, dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, program dan petunjuk di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat”.

Bila dilihat dari tugas di atas bahwa Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo bukanlah SKPD teknis sehingga terkendala dari bentuk SKPD yang hanya melaksanakan tugas Koordinasi dan Fasilitasi. Mengingat tantangan tugas kedepan yang harus diemban oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo sangat besar dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesra sangat perlu kiranya merubah bentuk SKPD yang mulanya hanya berbentuk Biro menjadi suatu Badan sehingga peran lebih besar lagi sebagai SKPD teknis.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan good governance. Dalam lima tahun ke depan, Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu perencanaan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap

bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian lingkup Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Rumusan tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2015 Tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat, mempercepat pengembangan kualitas SDM perempuan yang handal, dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, program dan petunjuk di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat.

2. Fungsi

Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi melaksanakan penjabaran dan mendukung Visi Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut di atas, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan rakyat dan perlindungan anak serta kesejahteraan rakyat.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan kesejahteraan, perlindungan anak serta keagamaan, budaya dan adat.

- c. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak serta kesejahteraan rakyat.

Dari Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas lebih lanjut dijabarkan secara operasional dan terinci pada masing-masing Bagian dan Sub Bagian. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Kesra di Provinsi Gorontalo.

1) Bagian Pemberdayaan Perempuan

Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu : a). Sub Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, b). Sub Bagian Pengarusutamaan Gender, c). Sub Bagian Data Informasi Gender dan Anak. Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan. Mempunyai fungsi : a). Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender dan kelembagaan, b). Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender dan kelembagaan, c). Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemberdayaan perempuan dengan dinas, badan dan lembaga masyarakat, d). Pemantauan, analisis dan penyiapan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan.

2) Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak

Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu : a). Sub Bagian Perlindungan Perempuan, b). Sub Bagian Perlindungan Anak, c). Sub Bagian Tumbuh Kembang Anak. Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan Kesejahteraan serta perlindungan anak. Mempunyai fungsi : a). Penyiapan dan perumusan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan anak serta advokasi hukum, HAM perempuan dan

anak, b). Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak serta advokasi hukum, HAM perempuan dan anak, c). Pelaksanan hubungan kerja di bidang perlindungan perempuan dan anak dengan dinas, badan, dan lembaga masyarakat, d). Pemantauan, analisa dan penyiapan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.

3) Bagian Kesra

Bagian Kesra terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu : a). Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, b). Sub Bagian Keagamaan, Adat dan Budaya, c). Sub Bagian Tata Usaha Biro. Bagian Kesra mempunyai tugas menjabarkan garis besar rencana program, kebijakan dan koordinasi yang telah disusun Kepala Biro khususnya dalam rangka penyusunan kebijakan dan program pembinaan serta petunjuk dibidang keagamaan, adat dan Budaya dan kesejahteraan rakyat. Mempunyai fungsi : a). Mengendalikan ketatalaksanaan kegiatan di bagian kesejahteraan rakyat yang merupakan tugas rutin, antara lain : mengendalikan dan mengatur sub - sub bagian sehubungan dengan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, mendisposisi/ mendelegasikan surat - surat yang masuk ke Bagian kesejahteraan rakyat, b).

Melakukan koordinasi lintas sektor tentang kegiatan keagamaan dan membantu pelaksanaannya, c). Melakukan koordinasi baik langsung maupun tidak langsung dengan instansi terkait, serta melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas subbag-subag serta ketatausahaan dan staf dalam pelaksanaan tugasnya.

D. Struktur Organisasi

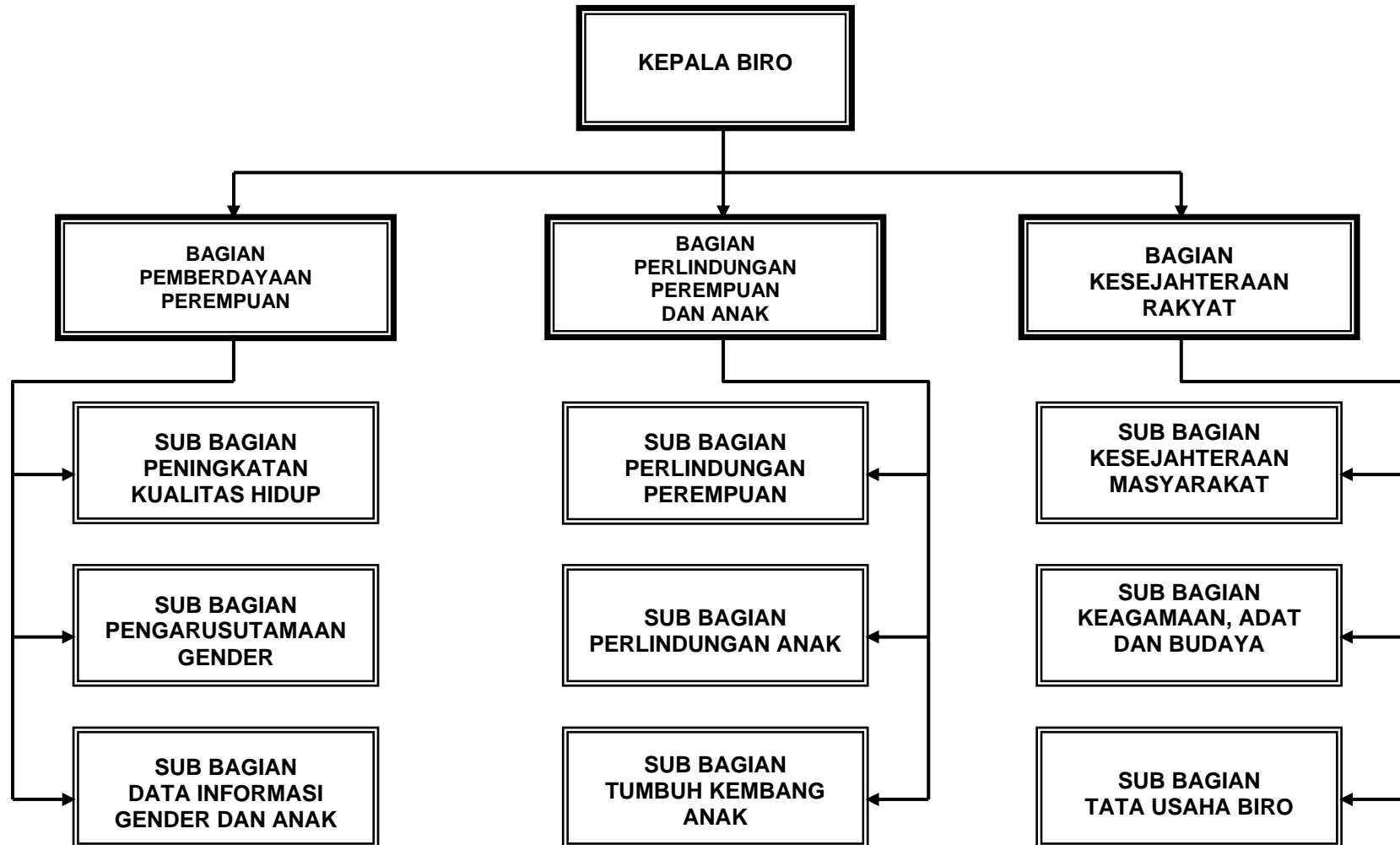
Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Gubernur Gorontalo No. 48 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, maka susunan organisasi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo terdiri dari :

1. Kepala Biro
2. Bagian Pemberdayaan Perempuan
3. Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak

4. Bagian Kesra

Susunan Organisasi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo yang telah diuraikan di atas dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



E. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo secara terintegrasi dan komprehensif akan sangat menentukan, maka karena itu peningkatan profesionalisme serta pengembangan budaya kerja diharapkan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini, perlu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan kriteria gender :

1. Tingkat Pendidikan

Sampai dengan 31 Desember 2015 Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo berjumlah 29 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S2. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo dari 29 orang PNS terdiri dari jenjang pendidikan mulai dari SMA,D1,D3,S1 dan S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS di lingkungan Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

Tabel 1
Sumber Daya Aparatur Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
Setda Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan

No	Bagian/Bidang	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D3	D1	SMA	
1	Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
2	Kepala Bagian	1	2	-	-	-	3
3	Kepala Sub Bagian	3	5	-	-	1	9
4	Staf	2	3	1	1	9	16
	Total						29

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2015

2. Tingkat Golongan dan Jenis Kelamin

Tabel 2
Sumber Daya Aparatur Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
Setda Provinsi Gorontalo Menurut Golongan

No	Bagian/Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Biro	1	-	-	-	1
2	Kepala Bagian	3	-	-	-	3
3	Kepala Sub Bagian	-	9	-	-	9
4	Staf	1	3	12	-	18
	Total	5	12	12	-	31

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2015

Tabel 3
Sumber Daya Aparatur Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
Setda Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bagian/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Biro	1	-	1
2	Kepala Bagian	1	2	3
3	Kepala Sub Bagian	4	5	9
4	Staf	11	5	18

	Total	18	13	31
--	--------------	-----------	-----------	-----------

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2015

F. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data dari Bendahara Barang Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
Setda Provinsi Gorontalo

No	Sarana	Jumlah	Ket
a. Kendaraan			
1.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	
2.	Kendaraan Roda 2	9 Unit	
b. Meja			
1.	Meja Kerja	35 Buah	
2.	Meja Rapat	1 Buah	
c. Kursi/Sofa			
1.	Kursi Kerja	40 Buah	
2.	Kursi/Sofa Tamu	1Unit/Set	
3.	Kursi Tunggu	4 Buah	
d. Lemari			
1.	Lemari Arsip	2 Buah	
2.	Lemari Buku	6 Buah	
3.	Filling Kabinet	3 Buah	
e. Komputer/Printer/Scanner			
1.	Komputer/PC	10 Unit	
2.	Printer	5 Unit	
3.	Monitor Dispaly	10 Unit	
4.	Proyektor/LCD	1 Unit	
5.	Scanner	1 Unit	
f. Alat Komunikasi			

1.	Wall Monitor	1 Unit	
2.	Televisi	2 Unit	
3.	Telepon	2 Unit	
g. Sarana Lainnya			
1.	AC Tempel	5 Unit	
2.	Mesin Ketik Biasa	2 Unit	
3.	Dispenser	5 Unit	
4.	Kulkas	1 Unit	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2015

Bab 2***Perencanaan dan Penetapan Kinerja*****A. Rencana Strategi**

Rencana Strategi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Provinsi Gorontalo. Renstra yang disusun ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan pedoman umum bagi manajemen Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta Kesra, melaksanakan pembangunan untuk jangka 5 (lima) tahun dan Tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kegiatan.

Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra SKPD.

1. Visi

Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo mempunyai peran dan posisi baik dalam upaya mensukseskan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo.

Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo mempunyai visi sesuai RENSTRA SKPD Tahun 2012-2017 sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI BERBAGAI BIDANG YANG
BERLANDASKAN MORALITAS AGAMA”***

2. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, harus ditetapkan misi organisasi yang jelas, adapun misi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo adalah :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.
2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Adat dan Keagamaan untuk kesejahteraan kehidupan Keluarga dan Masyarakat serta di lingkungan Aparatur Pemerintah.

3. Tujuan

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah dalam peride 2012-2017, tujuan yang ingin dicapai Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo adalah :

- a. Meningkatnya status, posisi dan kualitas hidup Perempuan Gorontalo.
- b. Meningkatnya pengintegrasian isu responsif gender dalam pembangunan baik perencanaan maupun pengannggaran di Provinsi dan Kab/Kota.
- c. Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.
- d. Terbangunnya Anak Gorontalo yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi.
- e. Meningkatnya pelayanan di bidang Agama, Adat istiadat dan Budaya serta terciptanya kerukunan hidup beragama.

4. Sasaran

Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan. Adapun sasaran Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo adalah :

Tujuan 1 : Meningkatnya status, posisi dan kualitas hidup perempuan Gorontalo.

Sasaran : Meningkatnya indikator kualitas hidup perempuan.

Tujuan 2 : Meningkatnya pengintegrasian isu responsif gender dalam pembangunan baik perencanaan maupun penganggaran di Provinsi dan Kab/Kota.

Sasaran : Meningkatnya rasio perencanaan dan penganggaran dalam pengintegrasian isu responsif gender di Provinsi serta Kab/Kota.

Tujuan 3 : Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan Dan Anak dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.

Sasaran : Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak.

Tujuan 4 : Terbangunnya anak Gorontalo yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi.

Sasaran :

- Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan PUG dan Anak termasuk ketersediaan data demi terwujudnya kesetaraan, keadilan jender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
- Mengadakan koordinasi kerja sama lintas sektor dengan Instansi terkait tentang masalah yang berhubungan dengan program dan kegiatan PP dan KPA.

Tujuan 5 : Meningkatnya pelayanan di bidang Agama, Adat Istiadat dan Budaya serta terciptanya kerukunan hidup beragama.

Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai - nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan.

5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah deskripsi kuantitatif atau kualitatif terhadap capaian kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama jangka waktu tertentu. Indikator kinerja merupakan sarana atau alat untuk melakukan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan/atau target.

Pada dasarnya, perumusan indikator kinerja adalah tanggung jawab manajemen, akan tetapi dapat juga dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara manajemen dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang dianggap berkepentingan. Dalam hal indikator kinerja telah dibuat manajemen, maka manajemen dapat meminta kepada auditor untuk mereview apakah indikator kinerja yang disusun telah sesuai dengan syarat-syarat indikator kinerja yang baik.

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran yang sangat berguna untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Adapun indikator kinerja sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
 Penentuan Indikator Kinerja Sasaran
 Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
 Setda Provinsi Gorontalo 2012-2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Menurunnya Angka Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah penanganan terhadap pengaduan kasus perempuan dan anak
2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah SKPD yang memiliki anggaran, program dan kegiatan yang Responsif Gender
		Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang mendapat bantuan usaha
3.	Peningkatan Pelayanan Terhadap Umat Beragama di Provinsi Gorontalo	Persentase kepuasan layanan publik di bidang keagamaan

6. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu dalam mencapai Visi dan Misi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo menyusun Grand Strategy. Adapun Grand Strategy yang disusun tersebut selain mendukung Visi dan Misi lembaga secara khusus, juga mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Strategi pokok Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo akan ditempuh melalui :

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan menekan angka kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas aparatur melalui budaya pemerintahan yang bersih, profesional dan transparan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerapan kebijakan program pembangunan.

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan sdm perempuan.
5. Menurunkan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

7. Kebijakan

Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran. Sedangkan, untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang diambil menjadi pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan organisasi. Lebih lanjut, untuk mengoperasionalkan sasaran strategis Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo, beberapa kebijakan teknis yang dapat dijadikan pedoman, adalah :

1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam dalam membangun daerah melalui bidang Pemerintahan dan Politik dalam pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang Pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
3. Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Menyempurnakan perangkat hukum yg lebih lengkap dalam melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk KDRT.
5. Memperkuat kelembagaan, dan jaringan PUG dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

8. Program Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur.

- 1) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .
 - 1) Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.
 - 1) Pelatihan Kelompok ekonomi Perempuan dan Peningkatan Kualitas ekonomi Perempuan
 - 2) Penunjang P2WKSS dan Gerakan Sayang Ibu.
 - 3) Forum Koordinasi PUG.
 - 4) Updating Data Terpilah.
- d. Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
 - 1) Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo.
 - 2) Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak.
 - 3) Forum Koordinasi Perlindungan Anak.
- e. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya.
 - 1) Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi, TC STQ dan Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo di Tingkat Nasional.
 - 2) Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Belum Memiliki Embarkasi/Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo Tahun 1436 H/2015 M.
 - 3) Kegiatan Bulan Suci Ramadhan 1436 H.
 - 4) Pembinaan Pelayanan Keagamaan.
 - 5) Penyelenggaraan Kegiatan Adat dan Budaya.

Keseluruhannya yang dilaksanakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015 berjumlah 5 (lima) Program dan 15 (lima belas) kegiatan.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Gorontalo merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Gorontalo yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Gorontalo. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/ pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2015 berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.

No.	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1. Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Setiap SKPD 2. Pemahaman dalam penginterasian PUG oleh Fokal Point di	15 SKPD dan Kab/Kota	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	1. Forum Koordinasi PUG. 2. Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

		setiap SKPD			
2.	Meningkatnya Nilai Indikator Kualitas Hidup Perempuan	1. Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang mendapat bantuan usaha 2. Produktifitas Kelompok Usaha Perempuan	10	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	1. Advokasi Desa Prima dan PPEP. 2. Penunjang P2WKSS dan Gerakan Sayang Ibu.

Misi 2 : Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.

No.	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan
1.	Menurunnya Angka Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penurunan kasus korban KDRT dan Trafficking di Provinsi Gorontalo	50% Jumlah kasus yang ditangani dari jumlah kasus yang masuk	Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo. 2. Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan. 3. Forum Koordinasi Perlindungan Anak.
2.	Meningkatnya Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak di Provinsi Gorontalo	Jaringan Kelembagaan Anak di Kab/Kota seProvinsi Gorontalo	96%	Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak. 2. Road Show Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Adat dan Keagamaan untuk kesejahteraan kehidupan Keluarga dan Masyarakat serta di lingkungan Aparatur Pemerintah.

No.	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan
1.	Peningkatan Pelayanan Terhadap Umat Beragama di Provinsi Gorontalo	Persentase kepuasan layanan publik di bidang keagamaan	96%	Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya.	1. Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi, TC STQ dan Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo di Tingkat Nasional.

						2. Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Belum Memiliki Embarkasi/Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo Tahun 1436 H/2015 M. 3. Kegiatan Bulan Suci Ramadhan 1436 H. 4. Pembinaan Pelayanan Keagamaan. 5. Penyelenggaraan Kegiatan Adat dan Budaya.
--	--	--	--	--	--	--

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo selama tahun 2015. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Tabel 6
Penetapan Kinerja Sasaran beserta Indikatornya Tahun 2015

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya Nilai Indikator Kualitas Hidup Perempuan	1. Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang mendapat bantuan usaha 2. Produktifitas Kelompok Usaha Perempuan	Kelompok	10	349,029,000	
2.	Menurunnya Angka Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penurunan kasus korban KDRT dan Trafficking di Provinsi Gorontalo	%	50	229,722,000	
3.	Meningkatnya Kesetaraan	1. Perencanaan dan Penganggaran	SKPD	15	368,094,000	

	Gender Dalam Pembangunan	Yang Responsif Gender di Setiap SKPD 2. Pemahaman dalam penginterasian PUG oleh Fokal Point di setiap SKPD				
4.	Meningkatnya Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak di Provinsi Gorontalo	Jaringan Kelembagaan Anak di Kab/Kota seProvinsi Gorontalo	%	96	354,446,000	
5.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Umat Beragama di Provinsi Gorontalo	Persentase kepuasan layanan publik di bidang keagamaan	%	96	6,584,161,000	

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi perwujudan yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembagan sebagai alat untuk menilai kinerja organisasi. LAKIP menjadi kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi.

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pencapaian kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo dalam tahun 2015 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Rencana} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi

(ultimateoutcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Urutan	Rencana Capaian	Kategori Capaian
I	>85	Sangat Berhasil
II	$70 < X \leq 85$	Berhasil
III	$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
IV	≤ 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	92,5
Berhasil	:	77,5
Cukup Berhasil	:	62,5
Tidak Berhasil	:	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

Tabel 7
Perbandingan Target Indikator Kinerja Sasaran
Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
Setda Provinsi Gorontalo
Tahun 2013 s/d Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Ket
				2013	2014	2015	
1.	Menurunnya Angka Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penurunan kasus korban KDRT dan Trafficking di Provinsi Gorontalo	%	30	40	50	
2.	Meningkatnya Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Setiap SKPD	SKPD	5	10	15	
		Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang mendapat bantuan usaha	Kelompok	10	10	10	
3.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Umat Beragama di Provinsi Gorontalo	Persentase kepuasan layanan publik di bidang keagamaan	%	100	96	96	

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka evaluasi kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk instrument pertanggungjawaban dan juga merupakan bentuk mekanisme memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

instansi pemerintah. Evaluasi kinerja menjadi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki kinerja organisasinya.

Sebagai langkah awal dalam proses penyusunan LAKIP adalah Pengukuran Kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan stratejik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sebagai ukuran keberhasilan masing-masing tingkatan organisasi dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan terdapat keterkaitan yang baik sehingga mudah dalam mengukurr, mengevaluasi dan menilai kinerja.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Tahap berikutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja

(performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadi gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

- ✓ Target Kinerja tahun ini dengan realisasi tahun ini.
- ✓ Realisasi tahun ini dan tahun lalu
- ✓ Capaian tahun ini dan tahun lalu.
- ✓ Capaian target tahun ini dengan target akhir Renstra
- ✓ Standar nasional (kalau ada)
- ✓ Permasalahan dan solusi.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal			
			Sangat Berhasil 85 s.d. 100	Berhasil 70 s.d. 85	Cukup Berhasil 55 s.d.70	Kurang Berhasil < 55
1.	Menurunnya Angka Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak	96	Sangat Berhasil	-	-	-
2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	98	Sangat Berhasil	-	-	-
3.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Umat Beragama di	96,63	Sangat Berhasil	-	-	-

	Provinsi Gorontalo					
Rata-rata Sasaran :	Capaian	96,88	Sangat Berhasil	-	-	-

Perolehan capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama tahun 2015 adalah sangat berhasil, karena dari semua indikator kinerja menunjukkan angka di rentang 85 - 100.

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Kelompok Capaian Kinerja Sasaran Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015

No	Capaian Kinerja Sasaran	Predikat	Jumlah Sasaran
1	Diatas 85	Sangat Berhasil	2
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil	-
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil	-
4.	Kurang dari 55	Kurang Berhasil	-
Jumlah			2

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015 semua sasaran mendapat predikat Sangat Berhasil.

Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo yaitu sebanyak 5 sasaran dengan 5 program yang mencakup 16 kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 91,16% (sangat berhasil). Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

1. Pencapaian Sasaran 1 (Menurunnya Angka Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak) :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Menurunnya Angka Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah penanganan terhadap pengaduan kasus perempuan dan anak	%	96	229,772,000	96

Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan oleh sedikitnya kasus yang ditangani sehingga serapan anggaran tidak maksimal. Selain itu kinerja juga ditunjang oleh adanya sosialisasi tentang Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disosialisasikan ke seluruh Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo. Kampanye anti kekerasan bukan hanya dilaksanakan melalui sosialisasi, akan tetapi dilaksanakan juga melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Koordinasi dengan lintas sektor juga sangat menunjang pencapaian sasaran ini. Koordinasi penanganan kasus selama tahun 2015 sangat baik dilaksanakan dengan melibatkan Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Tinggi Gorontalo, Kemenkumham Provinsi Gorontalo, Bapas Gorontalo, Lapas Gorontalo dan LSM.

Anggaran sasaran 1 pada tahun 2015 sebesar Rp. 229,772,000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 172,100,650,- (*Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*).

2. Pencapaian Sasaran 2 (Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan) :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah SKPD yang memiliki anggaran, program dan kegiatan yang Responsif Gender	%	96	346.126.800	94,03
		Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang mendapat bantuan usaha	%	96	334,278,200	95,77

Dari pengukuran kinerja pencapaian sasaran 2 tahun 2015 di atas menunjukkan capaian kinerja melalui indikator persentase pencapaian target kinerja sebesar 94,03% (sangat berhasil). Tingginya capaian kinerja ini disebabkan antara lain pada tahun 2015 telah dilaksanakan penerapan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) telah mulai digenjut dengan diawali dengan pelatihan-pelatihan yang pesertanya adalah SKPD baik Provinsi maupun Kab/Kota. Di masing-masing SKPD sudah dibentuk Fokal Point yang khusus menangani PPRG di masing-masing SKPD.

Dari tingkat penyerapan anggaran pada sasaran 2 ini adalah sebesar Rp. 346,126,800,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*) dari total anggaran sebesar Rp. 368,094,000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) atau sebesar 94,03%.

3. Pencapaian Sasaran 5 (Peningkatan Pelayanan Terhadap Umat Beragama di Provinsi Gorontalo) :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Pelayanan Terhadap Umat Beragama di Provinsi Gorontalo	Persentase kepuasan layanan publik di bidang keagamaan	%	96	6.362.053.930	96,63

Pada Tahun Anggaran 2015 alokasi anggaran pada sasaran 3 sebesar Rp. 6.584.161.000,- (*Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Satu*

Ribu Rupiah). Sedangkan realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 6.362.053.930,- (*Enam miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*) atau 96,63%.

Dari pengukuran kinerja pencapaian sasaran 3 tahun 2015, menunjukkan capaian kinerja melalui indikator persentase pencapaian target kinerja sebesar 96,63% dikatakan berhasil karena tingginya capaian kinerja ini disebabkan antara lain karena capaian kinerja program yang ditunjang oleh kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal. Antara lain adalah pelaksanaan fasilitasi Embarkasi Haji Antara Provinsi Gorontalo (EHA) yang sukses digelar setiap tahun termasuk tahun 2015, pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi dan Nasional, pelaksanaan kegiatan bulan suci Ramadhan serta ditambah dengan pelaksanaan Adat dan Budaya.

C. Akuntabilitas Keuangan

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja dan capaian atas target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

Capaian Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan di capai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisien, dan efektifitas dari pelaksanaan program kegiatan.

Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Standar Satuan Harga merupakan harga satuan unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar.

1. Realisasi Keuangan

a. Realisasi Keuangan Perjenis Belanja

Pada tahun 2015 Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.273.219.086 (*sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 2.453.219.086,- (*dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu delapan puluh enam rupiah*), sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.820.000.000,- (*delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*). Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 10,976,341,284,- (*sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*) atau 98,28%. Adapun rincian anggaran dan realisasi perjenis belanja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 10
Realisasi Keuangan Perjenis Belanja Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	+/-
A.	Belanja Tidak Langsung	2.690.800.716	2.647.721.798	98.40	43.078.918
B.	Belanja Langsung				
	1. Belanja Pegawai	301.300.000	283.645.000	94.14	17.655.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	8.479.391.000	8.083.017.880	95.33	396.373.120
	3. Belanja Modal	49.250.000	46.100.000	93.60	3.150.000
	Total	11.520.741.716	11.060.484.678	96.00	460.257.038

b. Realisasi Keuangan Sesuai Belanja Rutin

Pengeluaran belanja administrasi umum Tahun Anggaran 2015 yang telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian :

Tabel 11
Realisasi Keuangan sesuai Belanja Rutin Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	%
A.	Program Pelayanan			

Administrasi Perkantoran				
	1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	604.505.000	534.730.700	88.46
B.	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			
	2. Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	160.514.000	149.292.100	93.01

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan dan ditambah dengan Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dengan 1 kegiatan.

c. Realisasi Keuangan Per Kegiatan

Tabel 12
Realisasi Keuangan Per Kegiatan Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu	Realisasi		Saldo
			Keuangan		
			(Rp.)	(%)	
A.	Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	584.168.000	506.811.150	86.76	77.356.850
	1. Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo	229.722.000	172.050.650	74.90	57.671.350
	2. Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak	258.534.000	257.201.000	99.48	1.333.000
	3. Forum Koordinasi Perlindungan Anak	95.912.000	77.559.500	80.87	18.352.500
B.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	717.123.000	680.405.000	94.88	36.718.000
	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Provinsi Gorontalo	88.760.000	88.515.000	99.72	245.000
	2. Pelaksanaan Penilaian Program Terpadu P2WKSS dan Gerakan Sayang Ibu	258.534.000	245.919.200	95.12	12.614.800
	3. Forum Koordinasi PUG	166.284.000	146.657.600	88.20	19.626.400
	4. Updating Data Terpilah	113.050.000	110.954.200	98.15	2.095.800
	5. Pelatihan Kelompok	90.495.000	88.359.000	97.64	2.136.000

	Ekonomi Perempuan Guna Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				
C.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	604.505.000	534.730.700	88.46	69.774.300
	1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	604.505.000	534.730.700	88.46	69.774.300
D.	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	160.514.000	149.292.100	93.01	11.221.900
	1. Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	160.514.000	149.292.100	93.01	11.221.900
E.	Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya	6.763.631.000	6.541.5223.930	96.72	222.107.070
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi, TC STQ dan Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo di tingkat Nasional Tahun 2015	403.714.000	389.776.900	96.55	13.937.100
	2. Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Belum Memiliki Embarkasi/Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo Tahun 1436 H / 2015 M	4.300.910.000	4.224.939.630	98.23	75.970.370
	3. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan 1436 H/2015 M	541.224.000	530.051.900	97.94	11.172.100
	4. Pembinaan Pelayanan Keagamaan	1.259.975.000	1.177.804.600	93.48	82.170.400
	5. Penyelenggaraan Kegiatan Adat dan Budaya	257.808.000	218.950.900	84.93	38.857.100

2. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2015 Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.520.741.716,- (*sebelas miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah*). dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13
Alokasi Anggaran Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
A.	Belanja Tidak Langsung	2.690.800.716	
B.	Belanja Langsung		
	1. Belanja Pegawai	301.300.000	
	2. Belanja Barang dan Jasa	8.479.391.000	
	3. Belanja Modal	49.250.000	
	Total	11.520.741.716	

Untuk Provinsi Gorontalo secara keseluruhan total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang berjumlah Rp. 1.301.534.795.885.-. Jika dibandingkan dengan total APBD Provinsi Gorontalo, maka APBD Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 hanya 0,79 % dari total APBD Provinsi Gorontalo.

Bab 4***P*enutup**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lingkup Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo. Selain itu, pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan stakeholder lembaga ini.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unit organisasi dalam lingkup Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Penetapan sasaran strategi ini mengacu pada pemenuhan tujuan, misi dan visi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo sebagaimana telah disepakati dalam Rencana Strategi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo ini dibuat, dengan harapan

segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan ditahun-tahun yang akan datang.

Gorontalo, Januari 2016

**Kepala Biro
Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
Setda Provinsi Gorontalo**

Rifli M. Katili, S.Sos. M.Ec. Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750520 1993111002